

Komparasi Penanganan Krisis Komunikasi Program Pangan Publik di India dan China serta Implikasi Strategis bagi Program Makan Bergizi Gratis Indonesia

<http://dx.doi.org/10.25008/wartaiski.v9i1.460>

Narendra Angkita^{1*}, Faizal Yusuf Abdulgani¹, Hendra Syaputra¹

¹LSPR Institute of Communication and Business

Jln. K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta 10220 – Indonesia

*Email Korespondensi: 25172430032@lspr.edu

Submitted: Dec 23, 2025, **Revised:** May 6, 2026, **Accepted:** May 11, 2026

Terakreditasi SINTA-4 SK Kemristekdikti No. 72/E/KPT/2024 sampai Vol 10(2) tahun 2027

Abstract - The Free Nutritious Meal Program (MBG) in Indonesia is a strategic policy aimed at addressing stunting and malnutrition; however, its implementation is vulnerable to communication crises, particularly concerning budget-related issues and the quality of execution. This study aims to formulate strategic implications for MBG crisis communication through a comparative analysis of crisis management in public food programs in India (Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman) and China (Nutrition Improvement Program). Using a qualitative approach with a comparative case study design, this research analyzes each country's crisis response patterns through the frameworks of the Situational Crisis Communication Theory (SCCT) and the Two-Way Symmetrical Model. The analysis reveals significant differences: India tends to employ a Rebuilding strategy that emphasizes open accountability and dialogic corrective actions, whereas China focuses on restoring the authority's image through information control and strict legal enforcement. Based on these findings, this study recommends that the Indonesian government adopt a "Proactive Accountability" strategy by positioning the Rebuilding strategy—comprising sincere apologies (mortification) and measurable corrective actions—as the mandated crisis response approach. This should be supported by symmetrical dialogue mechanisms to maintain policy legitimacy and public trust within a democratic system.

Keywords: Crisis Communication, Free Nutritious Meal Program, Situational Crisis Communication Theory, Comparative Study, Public Policy.

Abstrak - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia merupakan kebijakan strategis untuk mengatasi masalah *stunting* dan gizi buruk, namun pelaksanaannya rentan terhadap krisis komunikasi, baik terkait isu anggaran maupun kualitas implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan implikasi strategis bagi komunikasi krisis MBG melalui studi komparatif terhadap penanganan krisis pada program pangan publik di India (*Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman*) dan China (*Nutrition Improvement Program*). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif, penelitian ini menganalisis pola respons krisis kedua negara melalui kerangka *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT) dan *Two-Way Symmetrical Model*. Hasil analisis menunjukkan perbedaan signifikan: India cenderung menerapkan strategi *Rebuilding* yang mengedepankan akuntabilitas terbuka dan tindakan korektif dialogis, sementara China berfokus pada pemulihan citra otoritas melalui kontrol informasi dan penindakan hukum tegas. Berdasarkan pembelajaran tersebut,

penelitian ini merekomendasikan bahwa pemerintah Indonesia harus mengadopsi strategi "Akuntabilitas Proaktif" dengan menjadikan strategi *Rebuilding*—meliputi permintaan maaf tulus (*mortification*) dan perbaikan terukur—sebagai mandat respons krisis. Pendekatan ini perlu didukung oleh mekanisme dialog simetris untuk menjaga legitimasi kebijakan dan kepercayaan publik dalam sistem demokrasi.

Kata Kunci: Komunikasi Krisis, Program Makan Bergizi Gratis, *Situational Crisis Communication Theory*, Studi Komparatif, Kebijakan Publik.

PENDAHULUAN

Program pangan publik berskala besar, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), diperkenalkan ke publik sebagai program unggulan dalam Pilpres 2024 dan direncanakan diluncurkan secara bertahap mulai tahun 2025, setelah pasangan Prabowo-Gibran dinyatakan menang. Latar belakang utama program ini adalah kesadaran bahwa *stunting*, kekurangan gizi, dan ketimpangan akses pangan masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Kesehatan, prevalensi *stunting* nasional masih berada di angka sekitar 21,6% pada tahun 2022, jauh dari target ideal WHO yaitu kurang dari 14%.

Program MBG merupakan elemen penting dalam kebijakan sosial yang bertujuan menekan angka kelaparan dan *stunting*, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, sejalan dengan upaya strategis untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Program ini menyasar siswa sekolah dasar dan menengah dengan memberikan makanan bergizi secara cuma-cuma, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), guna mengatasi ketimpangan akses terhadap gizi yang memadai.

Program skala besar seperti pangan publik hampir selalu berhadapan dengan potensi krisis komunikasi, baik terkait isu pendanaan yang besar, efektivitas implementasi di lapangan, maupun keraguan publik terhadap manfaat program tersebut. Di Indonesia, pelaksanaan MBG mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat dan media arus utama, menyoroti permasalahan seperti distribusi yang tidak merata dan dugaan rendahnya kualitas makanan yang disediakan (CNN Indonesia, 2024; Tempo, 2024). Sejumlah pihak juga mempertanyakan kebutuhan anggaran besar yang diperkirakan mencapai Rp 400 triliun per tahun. Untuk memitigasi risiko tersebut, perbandingan dengan pengalaman global menjadi krusial:

Pemerintah India telah menjalankan program Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN), dulunya *Mid-Day Meal Scheme*, sejak tahun 1995, memberi makan lebih dari 118 juta siswa. Meskipun membawa dampak sosial besar, program ini menghadapi tantangan serius, termasuk kasus keracunan massal di Bihar pada tahun 2013 (India Today, 2013) yang menewaskan lebih dari 20 anak. Insiden ini menjadi krisis komunikasi terbesar yang memicu kritik soal kebersihan, pengawasan, dan akuntabilitas, sementara pemerintah China, meskipun memiliki sistem yang lebih sentralistik, menghadapi masalah serupa dalam program kebijakan publik berskala besar.

Isu krisis di China seringkali berpusat pada integritas rantai pasokan makanan sekolah, korupsi birokrasi di tingkat lokal, dan tantangan dalam menjamin kualitas nutrisi yang seragam di seluruh provinsi. Berita mengenai keracunan makanan sekolah atau penyediaan bahan pangan yang tidak layak seringkali memicu kritik publik yang intens di media sosial, yang harus direspon dengan cepat oleh pemerintah pusat (Liu et al., 2011).

Krisis pada program pangan publik di India dan China ditanggapi sebagai isu kedaulatan nasional dan bukan sekadar isu operasional. Keseriusan respons ini menjadi pembelajaran penting. India menunjukkan keseriusan respons dengan cukup cepat. Pasca-tragedi keracunan di Bihar, media dan publik India menuntut pertanggungjawaban politik dan peningkatan signifikan pada standar pengawasan makanan. Kasus ini direspons pemerintah dengan penetapan standar *Food Safety and Standards Authority of India* (FSSAI) yang lebih ketat, peningkatan alokasi dana untuk pengawasan harian, dan jaminan kompensasi penuh kepada korban. Sikap ini menunjukkan pengakuan penuh terhadap kesalahan sistemik (*Corrective Action*), yang merupakan keharusan untuk memulihkan kepercayaan publik dalam sistem demokrasi yang bebas (India Today, 2013).

Sementara China, meskipun memiliki sistem yang lebih terkontrol, merespons krisis kualitas makanan dengan intervensi pemerintah pusat yang cepat dan keras. Krisis sering direspons dengan segera memecat atau memenjarakan pejabat yang bertanggung jawab atas korupsi atau kelalaian.

Tindakan ini merupakan mekanisme komunikasi yang bertujuan meyakinkan publik bahwa negara memiliki kekuatan mutlak untuk menjamin keselamatan warganya, meski dilakukan dengan cara yang *one-way* (Liu et al., 2011).

Dari kedua contoh tersebut, Indonesia dapat belajar banyak dengan menyusun implikasi yang cukup strategis bagi MBG Indonesia. Indonesia berada di antara kedua model tersebut: memiliki kompleksitas geografis India, namun harus mempertahankan akuntabilitas demokratis layaknya India. Program MBG adalah kebijakan *high-stakes* dengan anggaran besar (Kompas.com, 2024).

Oleh karena itu, studi komparatif ini menawarkan peta jalan strategis bagi pemerintah Indonesia agar tidak hanya merespons krisis, tetapi juga merancang sistem komunikasi yang resilien, mampu menyerap kritik, dan secara berkelanjutan membangun kepercayaan publik terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.

Studi komparatif lintas negara ini sangat relevan karena India dan China memiliki karakteristik yang mirip dengan Indonesia dalam konteks kebijakan publik, dan didukung dengan kerangka tata kelola yang hampir mirip dalam hal skala dan kompleksitas, dimana ketiga negara memiliki populasi yang sangat besar dan keragaman geografis/sosial yang ekstrem, membuat tantangan distribusi dan kontrol kualitas program pangan publik sangat kompleks.

Dalam bidang transparansi dan politik: India dan Indonesia adalah negara demokrasi dengan ruang dialog yang luas di media, menuntut strategi komunikasi krisis yang empatik, kolaboratif, dan akuntabel. Sementara China, dengan tata kelola yang sentralistik, memberikan perspektif tentang bagaimana krisis dikelola di tengah kontrol informasi yang ketat. Dan yang terakhir adalah bagaimana isu terkait kebijakan, dimana adanya fokus kebijakan yang sama, yaitu mengatasi masalah stunting dan gizi anak, menegaskan bahwa isu krisis yang muncul di India dan China (kualitas, korupsi, implementasi) adalah isu yang sama-sama mengancam legitimasi MBG Indonesia.

Oleh karena itu, membandingkan pengalaman India dan China, yang telah menghadapi krisis "tragis" dan memiliki sejarah respons panjang, dapat memberikan implikasi strategis yang sangat berharga bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan strategi komunikasi krisis yang lebih proaktif, sehingga mampu menjaga stabilitas narasi, kepercayaan publik, dan efektivitas implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi penanganan krisis komunikasi diterapkan oleh pemerintah India dan China dalam program pangan publik mereka? Dan kemudian, bagaimana perbandingan efektivitas strategi penanganan krisis tersebut berdasarkan atribusi publik dan model komunikasi yang diterapkan? Dan yang terakhir, bagaimana implikasi strategis dari pembelajaran komparatif di India dan China dapat diterapkan untuk merumuskan strategi komunikasi krisis yang efektif bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disusun tujuan dari penelitian ini di mana dapat menganalisis strategi penanganan krisis yang digunakan oleh pemerintah India dan China dalam konteks program pangan publik mereka. Dan kemudian membandingkan dan mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi krisis tersebut, serta dapat merumuskan rekomendasi implikasi strategis untuk perbaikan strategi komunikasi krisis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia.

Penelitian ini memiliki dua jenis manfaat yang berbeda namun saling terkait satu dengan yang lain, yaitu manfaat secara teoritis dan akademis. Manfaat Teoritisnya adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori komunikasi krisis, terutama dalam konteks implementasi kebijakan sosial dan pelayanan publik di negara berkembang.

Sedangkan manfaat praktisnya adalah bagaimana penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hubungan masyarakat pemerintah, dan pemangku kepentingan di Indonesia dalam merumuskan strategi komunikasi krisis yang lebih efektif dan responsif dalam menghadapi tantangan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan kemudian juga diharapkan dapat menyediakan peta jalan strategis bagi pemerintah Indonesia untuk mengelola persepsi publik, meningkatkan akuntabilitas, dan membangun legitimasi kebijakan melalui pembelajaran dari kasus India dan China.

KERANGKA TEORI

Studi ini menggunakan Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikembangkan oleh W. Timothy Coombs. Teori ini merupakan kerangka kerja teoritis yang berfokus pada

perlindungan reputasi organisasi selama masa krisis. Teori ini berlandaskan pada *Attribution Theory* dalam psikologi sosial, yang menyatakan bahwa khalayak akan mencari penyebab dari suatu kejadian, dan atribusi tanggung jawab ini pada akhirnya akan menentukan seberapa besar ancaman reputasi yang dihadapi organisasi (Coombs, 2007). Dalam konteks program pangan publik seperti MBG di Indonesia dan PM POSHAN di India, SCCT menjadi lensa utama untuk memahami dinamika persepsi publik dan respons pemerintah.

Menurut SCCT, respons komunikasi yang paling efektif adalah yang disesuaikan dengan persepsi publik terhadap tingkat tanggung jawab yang diemban oleh organisasi atau institusi (pemerintah) atas krisis yang terjadi. Coombs mengelompokkan berbagai krisis ke dalam tiga klaster utama berdasarkan tingkat atribusi tanggung jawab publik.

Pertama, Klaster Korban (*Victim Cluster*): Dalam klaster ini, publik menganggap pemerintah sama sekali tidak bertanggung jawab, bahkan mungkin sebagai korban dari pihak ketiga atau rumor (misalnya, program menjadi korban *hoax* di media sosial). Tingkat ancaman reputasi yang dihadapi rendah.

Kedua, Klaster Kecelakaan (*Accidental Cluster*): Publik mengatribusikan tanggung jawab secara moderat. Krisis terjadi akibat kecelakaan yang tidak disengaja atau kegagalan teknis yang tidak dapat diprediksi. Dan yang terakhir, Klaster yang Dapat Dicegah (*Preventable Cluster*): Ini adalah klaster yang paling berbahaya. Publik menganggap krisis muncul akibat kelalaian, kesalahan manajemen, atau pelanggaran etika yang dilakukan pemerintah. Krisis seperti keracunan massal di India atau dugaan korupsi dalam pengadaan makanan di China akan diklasifikasikan di sini, di mana tingkat ancaman reputasi berada pada level tertinggi (Coombs & Holladay, 2012).

Setelah krisis diklasifikasikan ke dalam salah satu klaster, SCCT merekomendasikan strategi respons krisis yang paling sesuai untuk meminimalisir kerusakan reputasi. Strategi ini terbagi menjadi empat kategori utama. Pertama, Strategi Penyangkalan (*Denial*): Digunakan saat tanggung jawab organisasi rendah (Klaster Korban), seperti menuduh pihak luar atau menyangkal keberadaan krisis. Kedua, Strategi Pengurangan (*Diminishment*): Digunakan untuk mengurangi persepsi negatif dengan menjustifikasi tindakan atau meminimalisir dampak krisis. Ketiga, Strategi Pembangunan Kembali (*Rebuilding*): Ini adalah strategi akomodatif yang harus digunakan ketika atribusi tanggung jawab tinggi (Klaster yang Dapat Dicegah).

Strategi ini meliputi Permintaan Maaf (*Apology*) dan Tindakan Korektif (*Corrective Action*) untuk mencegah krisis serupa di masa depan. Dan yang terakhir, Strategi Penguatan (*Bolstering*): Strategi tambahan yang digunakan untuk mengingatkan publik tentang kinerja positif organisasi di masa lalu, sering dikombinasikan dengan strategi lain untuk meningkatkan *goodwill* (Coombs, 2007).

Dalam studi komparatif ini, SCCT akan berfungsi sebagai alat evaluasi normatif. Strategi pemerintah India dalam merespons keracunan (sebuah krisis *Preventable*) dapat dinilai efektif jika melibatkan *Rebuilding* dan *Mortification* (sesuai IRT), sedangkan respons China dapat dianalisis sejauh mana ia menyimpang dari rekomendasi SCCT dengan lebih memilih strategi *Diminishment* sambil menindas pelaku, sebagaimana disinggung oleh Liu et al. (2011).

Dengan menggunakan SCCT, penelitian ini dapat diharapkan dapat melampaui deskripsi semata dan secara akademik mengevaluasi apakah strategi komunikasi krisis yang diterapkan oleh India dan China sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang seharusnya mereka terima, sehingga memberikan pembelajaran yang relevan dan strategis bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia

Two-Way Symmetrical Model

Konsep *Two-Way Symmetrical Model* yang diperkenalkan oleh James E. Grunig dan Todd Hunt (1984) merupakan model praktik *public relations* yang paling etis dan efektif dalam membangun hubungan jangka panjang antara organisasi, dalam hal ini, pemerintah dengan publiknya. Model ini menekankan dialog dua arah yang saling menguntungkan (*mutual understanding*), berbeda secara fundamental dengan model komunikasi satu arah (seperti *Press Agency* atau *Public Information*) maupun model dua arah asimetris yang bertujuan memanipulasi atau membujuk publik.

Inti dari *Two-Way Symmetrical Model* adalah bahwa lembaga perlu membuka ruang komunikasi yang memungkinkan publik memberikan umpan balik (*feedback*), dan kemudian lembaga bersedia menyesuaikan pesan atau bahkan tindakan kebijakan berdasarkan dinamika persepsi publik tersebut. Grunig dan Hunt (1984) memandang model ini sebagai pendekatan yang paling etis karena berfokus pada kepentingan publik dan bukan sekadar kepentingan institusional.

Penerapan dialog dua arah ini menjadi sangat penting dalam konteks kebijakan publik, terutama program sosial berskala nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menyentuh kepentingan masyarakat luas dan sering menuai resistensi. Kegagalan komunikasi dalam konteks kebijakan publik dapat berdampak pada legitimasi politik dan stabilitas sosial.

Dalam konteks komunikasi krisis, *Two-Way Symmetrical Model* berfungsi sebagai standar ideal untuk akuntabilitas. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia dan India, legitimasi kebijakan sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat. Model ini secara praktis menegaskan komitmen pemerintah untuk mendengarkan kritik dan menyesuaikan kebijakan, yang pada gilirannya menjaga dan memperkuat kepercayaan publik.

Model ini mendukung pendekatan respons krisis yang adaptif dan kolaboratif. Contohnya, ketika pemerintah India merespons krisis keracunan massal (sebuah krisis *Preventable* dalam SCCT), tindakan mereka yang cenderung mengambil langkah *acknowledge and correct* dan berdialog dengan organisasi masyarakat sipil, mencerminkan penerapan prinsip *Two-Way Symmetrical Model*.

Lebih lanjut, komunikasi krisis dalam konteks kebijakan publik harus dipahami sebagai proses pembelajaran institusional. Seeger, Sellnow, dan Ulmer (2003) menekankan bahwa setiap krisis kebijakan memberikan kesempatan bagi organisasi publik untuk memperbaiki desain kebijakan melalui dialog publik, yang merupakan esensi dari model simetris.

Dalam penelitian ini, *Two-Way Symmetrical Model* digunakan sebagai variabel pembanding kualitatif untuk mengukur tingkat kedemokrasian dan dialog dalam strategi komunikasi krisis di ketiga konteks negara, dimana di India dan Indonesia diharapkan mendekati model simetris, di mana kritik (melalui media, parlemen, atau media sosial) ditanggapi dengan klarifikasi dan penyesuaian (dialogis). Sementara di China, sebaliknya, China menunjukkan respons yang lebih mengarah ke model satu arah (kurang dialogis), sehingga membantu mengidentifikasi perbedaan efektivitas komunikasi krisis berdasarkan sistem politik.

Dengan demikian, *Two-Way Symmetrical Model* (Grunig & Hunt, 1984) bukan hanya konsep pelengkap, melainkan landasan filosofis dan etis untuk mengevaluasi seberapa efektif pemerintah mempertahankan legitimasi di tengah krisis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

METODE PENELITIAN

Pemilihan unit analisis dalam studi kasus komparatif ini dilakukan melalui penelusuran arsip media massa sekunder secara sistematis. Prosedur diawali dengan identifikasi kata kunci komparatif yang relevan dengan fokus penelitian, meliputi kombinasi frasa "Makan Bergizi Gratis", "Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman", "*Mid-Day Meal*", "*Nutrition Improvement Program*" dan "krisis komunikasi" atau "keracunan" untuk mengaitkan kasus Indonesia, India, dan China. Pencarian dilaksanakan menggunakan *advanced search operator* pada mesin pencari utama, dengan membatasi sumber pada media massa arus utama dan terpercaya untuk meminimalisasi bias informasi.

Selanjutnya, data hasil pencarian disaring berdasarkan tiga kriteria utama: Kedalaman Analisis (memilih laporan mendalam atau opini analitis, bukan berita harian biasa), Aspek Krisis Komunikasi (artikel harus membahas kritik, masalah, atau respons resmi pemerintah), dan Relevansi Komparatif (minimal satu artikel harus secara eksplisit menyinggung kedua negara atau konteks China sebagai perbandingan). Setelah proses penyaringan, artikel yang terpilih didokumentasikan sebagai data sekunder untuk selanjutnya dianalisis melalui pengodean awal dan analisis tematik.

Berdasarkan karakteristik tersebut, terpilihlah dua artikel sebagai unit analisis didasarkan pada keselarasan sempurna antara karakteristik penelitian komparatif ini dan prasyarat teoretis yang dianut dengan mengacu kepada relevansi komparatif dan isu kebijakan, yaitu artikel CNBC Indonesia berjudul "Pelajaran Pahit China-India, MBG di RI Bisa Meledak Jadi Tragedi" secara inheren menyediakan latar belakang risiko krisis dengan memosisikan pengalaman India dan China sebagai pembelajaran strategis untuk MBG Indonesia, yang langsung membenarkan desain Studi Kasus Komparatif Lintas Negara.

Berikutnya adalah artikel Kompas.id berjudul "Belajar Penanganan Kasus Keracunan MBG dari China dan India" menetapkan fokus kebijakan yang spesifik, yaitu penanganan keracunan atau kegagalan kualitas, yang merupakan salah satu bentuk krisis paling parah dalam program pangan publik.

Pemilihan kedua artikel ini didorong oleh kebutuhan untuk menganalisis krisis *Preventable Cluster* di bawah kerangka SCCT, dengan frasa kunci seperti "Tragedi" dan "Kasus Keracunan" mengindikasikan krisis yang memiliki tingkat atribusi tanggung jawab publik yang tinggi, dimana

menurut SCCT, krisis ini adalah krisis yang dapat dicegah (*Preventable Cluster*), yang menuntut strategi respons akomodatif (*rebuilding*).

Melalui konten artikel, peneliti dapat menganalisis apakah respons pemerintah India terhadap keracunan massal tahun 2013 sudah sesuai dengan rekomendasi SCCT, atau sejauh mana respons China yang lebih sentralistik menyimpang dari kerangka ini.

HASIL PENELITIAN

Analisis penanganan krisis pada program pangan publik di India dan China mengungkap pola strategi komunikasi yang dipengaruhi secara mendalam oleh struktur pemerintahan dan tuntutan akuntabilitas publik di masing-masing negara. Pola respons ini dapat dianalisis menggunakan dua kerangka utama: atribusi tanggung jawab publik (*Situational Crisis Communication Theory/SCCT*) dan strategi retorik yang digunakan (*Image Repair Theory/IRT*).

Strategi Respons Krisis India: Akuntabilitas dan Tindakan Korektif

Dalam menghadapi krisis kualitas makanan berskala besar, seperti insiden keracunan massal, respons Pemerintah India cenderung mengadopsi pendekatan akuntabilitas terbuka dan tindakan korektif yang kuat. Hal ini sejalan dengan tuntutan sistem demokrasi yang membutuhkan legitimasi melalui kepercayaan publik. Sedangkan dalam kaitannya dengan SCCT, krisis keracunan di India (seperti kasus Bihar 2013) sering kali diklasifikasikan publik sebagai krisis dapat dicegah (*Preventable Cluster*) (Coombs, 2007). Atribusi tanggung jawab yang tinggi ini memaksa pemerintah untuk tidak menggunakan strategi penolakan (*denial*).

Selanjutnya, India cenderung menggunakan pendekatan yang mencerminkan penggunaan Model Simetris Dua Arah (*Two-Way Symmetrical Model*) (Grunig & Hunt, 1984), di mana pemerintah menunjukkan kemauan untuk mengakomodasi kritik dan melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan umpan balik tragis dari publik.

Strategi Respons Krisis China: Kontrol, Penindakan, dan Pemulihan Otoritas

Sebaliknya, respons China terhadap krisis implementasi kebijakan publik, termasuk masalah kualitas makanan sekolah, lebih dipengaruhi oleh sistem pemerintahan sentralistik dan kontrol informasi yang ketat. Fokus utama respons China adalah pada pemulihan citra otoritas dan kontrol. Dalam kaitannya dengan SCCT, meskipun krisis kualitas makanan sering dikategorikan sebagai krisis yang dapat dicegah, respons awal China sering menunjukkan upaya Pengurangan Ancaman (*Diminishment*) atau bahkan Penolakan (*Denial*) sementara, dengan mencoba membatasi penyebaran informasi negatif.

Respons ini cenderung mengikuti Model Asimetris Satu Arah (*One-Way Asymmetrical Model*) atau model Publisitas (*Press Agency*) (Grunig & Hunt, 1984). Komunikasi utamanya berfokus pada menyampaikan keputusan yang telah diambil oleh otoritas tinggi dan menghilangkan narasi krisis, daripada terlibat dalam dialog yang setara dengan publik.

Implikasi Komparatif bagi Program MBG Indonesia

Perbandingan ini memberikan landasan strategis bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Sebagai negara demokrasi dengan lingkungan media yang sangat bebas (seperti India), Indonesia akan dihadapkan pada tuntutan akuntabilitas publik yang tinggi.

Pemerintah Indonesia tidak dapat mengadopsi model China yang berfokus pada kontrol informasi dan penindakan tanpa akuntabilitas terbuka, karena hal itu akan merusak legitimasi kebijakan di mata masyarakat demokratis. Pembelajaran dari India adalah bahwa respon krisis yang paling efektif harus secara proaktif menggabungkan kecepatan respons dengan strategi mortification (penyesalan) yang tulus, dan yang terpenting, tindakan korektif yang jelas dan terukur untuk membangun kembali kepercayaan publik.

Pembelajaran utamanya yang bisa didapat dari India adalah bagaimana Indonesia harus mampu menerapkan Strategi Akuntabilitas Proaktif. Ketika krisis terjadi (misalnya, masalah kualitas atau distribusi), pemerintah harus segera menggunakan strategi *Mortification* (permintaan maaf tulus) dan secara transparan mengumumkan *Corrective Action* (tindakan perbaikan terukur) untuk mencegah keruntuhan legitimasi. Sementara dari China, Indonesia perlu belajar dari fokus China pada Efisiensi Pengawasan Cepat dan koordinasi yang kuat dari pusat ke daerah, khususnya dalam rantai pasokan.

Kasus-kasus krisis yang terjadi dalam program pangan publik di India dan China, seperti keracunan massal di India atau isu integritas rantai pasokan di China, secara konsisten diklasifikasikan sebagai krisis yang memiliki tingkat atribusi tanggung jawab publik yang tinggi, sehingga masuk dalam *Preventable Cluster* menurut *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT) (Coombs, 2007).

Klasifikasi ini didasarkan pada anggapan bahwa krisis tersebut muncul akibat kelalaian dalam pengawasan kebersihan, kualitas pangan, atau korupsi birokrasi, yang seharusnya dapat dicegah oleh otoritas pemerintah. Dalam konteks India, respons terhadap krisis cenderung mengarah pada strategi *Rebuilding* (Pembangunan Kembali), di mana pemerintah menunjukkan akuntabilitas publik dengan janji kompensasi dan tindakan korektif serius (misalnya, pengetatan standar pengawasan) untuk memulihkan kepercayaan pasca-tragedi.

Sebaliknya, respons China, meskipun juga berupaya memulihkan citra, seringkali diawali dengan strategi *Diminishment* (Pengecilan) risiko di media, yang diikuti dengan *Corrective Action* yang keras, seperti penindakan hukum yang cepat dan tegas terhadap pihak yang lalai. Perbedaan mendasar terletak pada tujuan akhir, dimana respons India bertujuan membangun kembali legitimasi melalui akuntabilitas publik dan penyesuaian kebijakan, sementara respons China berfokus pada pemulihan citra kontrol otoritas negara.

Implikasi Strategis dan Rekomendasi untuk Program MBG Indonesia

Indonesia, sebagai negara demokrasi dengan program sosial berskala besar seperti MBG, harus mengambil pembelajaran kritis dari pengalaman India dan China. Indonesia tidak dapat sepenuhnya meniru model China yang sentralistik dan *one-way* (kurang dialogis), namun juga tidak boleh mengabaikan pentingnya pengawasan yang ketat. Strategi komunikasi krisis Indonesia harus berada pada titik temu antara Akuntabilitas Demokratis (ala India) dan Efisiensi Kontrol (ala China).

Indonesia perlu menginternalisasi bahwa isu kualitas makanan, keracunan, dan dugaan korupsi dalam MBG akan segera diklasifikasikan publik sebagai krisis dapat dicegah (*Preventable Cluster*) (Coombs, 2007). Atribusi tanggung jawab yang tinggi ini menuntut strategi respons yang paling akomodatif. Respons Tuntas (*Rebuilding Strategy*) harus dilakukan, di mana pemerintah harus menghindari strategi penyangkalan (*denial*) atau pengecilan (*diminishment*) ketika krisis kualitas terjadi.

Strategi yang wajib dilakukan adalah pembangunan kembali reputasi (*Rebuilding*) yang mencakup: Permintaan Maaf Tulus (*Mortification*): Segera menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf terbuka atas kelalaian yang terjadi, meniru kecepatan respons akuntabel India. Kedua, tindakan korektif (*Corrective Action*) dengan mengumumkan langkah perbaikan yang jelas dan terukur, seperti audit mendalam rantai pasokan, penindakan hukum terhadap pihak yang lalai, dan pengetatan SOP, untuk meyakinkan publik bahwa masalah tidak akan terulang, dan terakhir, melakukan Strategi Penguatan (*Bolstering*), dimana strategi ini harus dilakukan secara simultan dengan *Rebuilding*. Pemerintah perlu secara konsisten mengomunikasikan niat baik dan manfaat gizi jangka panjang dari program MBG (misalnya, penurunan *stunting*), untuk mengimbangi persepsi negatif akibat krisis.

Dalam lingkungan demokrasi Indonesia, strategi *Rebuilding* harus diwujudkan melalui dialog untuk menjaga legitimasi politik. Ini menuntut penerapan *Two-Way Symmetrical Model* (Grunig & Hunt, 1984):

Berbeda dengan China yang hanya fokus mengomunikasikan keputusan, pemerintah Indonesia harus membuka ruang komunikasi untuk mendengarkan dan mengakomodasi kritik dari media, parlemen, dan masyarakat sipil. Kritik harus dipandang sebagai *feedback* yang berharga untuk perbaikan kebijakan (Seeger et al., 2003).

Penerapan model simetris memerlukan transparansi tidak hanya pada pesan akhir, tetapi juga pada proses penanganan krisis. Pemerintah harus mengomunikasikan proses investigasi dengan mengumumkan secara terbuka investigasi kasus keracunan atau korupsi (mirip dengan respons akuntabilitas India). Juga harus didukung dengan mekanisme pengawasan yang ketat dengan menjelaskan bagaimana *feedback* dari daerah (melalui partisipasi komunitas) akan diintegrasikan untuk menyesuaikan desain kebijakan MBG, dan tentu saja membuat semua hal-hal tadi sebagai bagian dari sebuah pembelajaran yang berkelanjutan, dimana akhirnya model simetris memungkinkan MBG berfungsi sebagai arena pembelajaran institusional.

Setiap krisis yang terjadi harus digunakan sebagai kesempatan untuk memperbaiki kelemahan kebijakan, memperkuat transparansi, dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan (Seeger et al., 2003).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia sangat rentan terhadap krisis komunikasi yang secara teoretis diklasifikasikan sebagai krisis dapat dicegah (*Preventable Cluster*) (Coombs, 2007), menuntut akuntabilitas tertinggi dari pemerintah. Analisis komparatif menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam penanganan krisis antara negara demokrasi (India) dan negara sentralistik (China), yang memberikan pembelajaran strategis bagi Indonesia.

Dalam kasus India, respons krisis yang efektif dalam kasus keracunan massal (krisis *Preventable*) ditandai dengan adopsi strategi *Rebuilding* (Pembangunan Kembali), yang mencakup permintaan maaf dan tindakan korektif yang kuat. Pendekatan ini selaras dengan ideal *Two-Way Symmetrical Model* (Grunig & Hunt, 1984), yang menjaga legitimasi kebijakan melalui akuntabilitas dan dialog terbuka.

Sementara di China, respons cenderung dikendalikan, berfokus pada penindakan hukum yang cepat terhadap pelaku lalai dan pemulihan citra otoritas negara, menunjukkan pendekatan yang lebih Asimetris Satu Arah.

Sehingga berdasarkan hasil analisis tersebut, Implikasi penting untuk MBG adalah bagaimana mempertahankan legitimasi di tengah kritik anggaran dan isu kualitas, dimana Indonesia harus mengadopsi model India, di mana akuntabilitas terbuka dan dialog menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan program dalam sistem demokrasi.

Rekomendasi Akademis

Penelitian selanjutnya perlu menguji lebih lanjut bagaimana atribusi tanggung jawab publik dalam SCCT dipengaruhi oleh budaya politik dan tingkat trust terhadap pemerintah, khususnya membandingkan *speed of denial* di sistem sentralistik (China) versus *speed of apology* di sistem demokrasi (India/Indonesia), dengan mendorong studi yang mengintegrasikan SCCT dan *Two-Way Symmetrical Model* untuk mengukur tidak hanya kesesuaian respons (*fit*), tetapi juga kualitas dialog dalam menanggapi krisis kebijakan publik.

Hal ini diperlukan untuk mengembangkan kerangka evaluasi yang lebih komprehensif. Atau penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan Metode Campuran (*Mixed Methods*) dengan mengombinasikan analisis isi media (kualitatif) dengan survei publik (kuantitatif) untuk secara empiris mengukur korelasi antara strategi komunikasi yang diterapkan (diukur oleh SCCT/IRT) dengan tingkat kepercayaan publik di Indonesia.

Rekomendasi Praktis

Rekomendasi ini ditujukan bagi praktisi hubungan masyarakat pemerintah, BGN, dan pengambil kebijakan Program MBG, dimana Strategi Respons *Rebuilding* sebagai Mandat: Pemerintah harus menjadikan strategi *Rebuilding* (Permintaan Maaf Tulus dan Tindakan Korektif Cepat) sebagai respons standar untuk setiap isu keracunan atau kegagalan kualitas (krisis *Preventable*) dalam MBG. Penyangkalan (*denial*) atau pengecilan (*diminishment*) harus dihindari karena akan melumpuhkan legitimasi kebijakan.

Pembentukan Mekanisme Dialog Simetris yang menerapkan *Two-Way Symmetrical Model* dengan membangun saluran umpan balik yang efektif dan transparan sangat perlu dilakukan dengan mendirikan Pusat Komunikasi Krisis MBG yang aktif memberikan klarifikasi di media sosial untuk mencegah *hoax* (Liu et al., 2011), mengadakan Forum Dialog Berkala dengan organisasi masyarakat sipil dan media untuk mendiskusikan feedback tentang implementasi dan anggaran (seperti yang dilakukan oleh India).

Mengambil pelajaran dari China mengenai efisiensi pengawasan, komunikasi harus proaktif mengumumkan langkah-langkah pencegahan secara terperinci (misalnya, audit rutin, sertifikasi supplier), juga perlu dilakukan untuk memitigasi potensi krisis sebelum terjadi. Dan terakhir dimana perlunya pemerintah melakukan Komunikasi Anggaran yang Berbasis Nilai dengan menggunakan strategi Penguatan (*Bolstering*) dengan mengaitkan anggaran tersebut langsung pada outcome sosial yang tidak ternilai, yaitu penurunan angka stunting nasional dan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Coombs, W. T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of situational crisis communication theory. *Corporate Reputation Review*, 10(3), 163–176.
<https://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1550049>
- Coombs, W. T., & Holladay, S. J. (2012). The paracrisis: The challenges created by publicly managing crisis prevention. *Public Relations Review*, 38(3), 408–415.
<https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2012.04.004>
- Fakih, M. F., & Sidik, B. (2024, 25 Agustus). *Belajar penanganan kasus keracunan MBG dari China dan India*. Kompas.id.
<https://www.kompas.id/artikel/belajar-penanganan-kasus-keracunan-mbg-dari-china-dan-india>
- Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). *Managing public relations*. Holt, Rinehart & Winston.
- India Today. (2013, 17 Juli). *Bihar mid-day meal deaths: Cooks recount horror*.
<https://www.indiatoday.in/india/north/story/bihar-mid-day-meal-deaths-cooks-recount-horror-170766-2013-07-17>
- Hendarto. Y. M. (2025, 8 Mei). *Urgensi evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis*.
<https://www.kompas.id/artikel/urgensi-evaluasi-pelaksanaan-program-makan-bergizi-gratis>
- Liu, B. F., Austin, L., & Jin, Y. (2011). How publics respond to crisis communication strategies: The interplay of information form and source. *Public Relations Review*, 37(4), 345–353.
- Prabowo: Statistik keracunan MBG 0,0007%, program 99,99% berhasil. (2025, 18 Oktober).
[cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251018185907-20-1286018/prabowo-statistik-keracunan-mbg-00007-program-9999-persen-berhasil](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251018185907-20-1286018/prabowo-statistik-keracunan-mbg-00007-program-9999-persen-berhasil)
- Ribuan Kasus Keracunan MBG, Dokter Gizi Soroti Masalah Kebersihan. (2025, 27 September).
[cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250925134544-255-1277617/ribuan-kasus-keracunan-mbg-dokter-gizi-soroti-masalah-kebersihan](https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250925134544-255-1277617/ribuan-kasus-keracunan-mbg-dokter-gizi-soroti-masalah-kebersihan)
- Seeger, M. W., Sellnow, T. L., & Ulmer, R. R. (2003). *Communication and organizational crisis*. Praeger.
- Tirta, E. B. E. (2025, 29 September). *Pelajaran pahit China & India: MBG di RI bisa meledak jadi tragedi*. CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20250929105903-128-670999/pelajaran-pahit-china-india-mbg-di-ri-bisa-meledak-jadi-tragedi>